


I'm not robot  reCAPTCHA

Open



# Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period

The Foundation of the New Order State (1950–1965)

Farabi Fakhri



BRILL

## Sistem Politik Ekonomi Liberal

**Antiremed Kelas 11 Sejarah**  
 Bab 05 - Masa Kemerdekaan Belanda

Antiremed	Antiremed
1. Menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia.	1. Menjelaskan latar belakang kemerdekaan Indonesia.
2. Menjelaskan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia.	2. Menjelaskan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Menjelaskan peran tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia.	3. Menjelaskan peran tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia.
4. Menjelaskan dampak kemerdekaan Indonesia.	4. Menjelaskan dampak kemerdekaan Indonesia.
5. Menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan.	5. Menjelaskan tantangan yang dihadapi Indonesia setelah kemerdekaan.



Pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan. Pelaksanaan politik etis di hindia belanda. Pelaksanaan politik etis digagas oleh. Pelaksanaan politik etis di indonesia. Pelaksanaan politik etis yang paling dirasakan.

Namun, jumlah orang yang pindah selama periode Politik Etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Kebijakan Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Surat kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda, dan sebagai editor De Locomotief, surat kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia, ia menerbitkan tulisan Snouck Hurgronje tentang pemahaman orang Indonesia. Diperoleh dari " "Development Policy in the Early 20th Century" in Jan-Paul Dirkse, Frans Hüsen and Mario Rutten, eds, Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under the New Order (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), pp. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. A History of Modern Indonesia. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1928, 75.000 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar Barat dan hampir 6.500 sekolah menengah, meskipun ini masih merupakan sebagian kecil dari populasi.[5] Penilaian Kebijakan tersebut merupakan upaya serius pertama untuk membuat program pembangunan ekonomi di daerah tropis. ISBN 0-521-54262-6. ^ Vickers, Adrian (2005). Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang penganjur Politik Etis. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang eksekusi pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumiliah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blivvers). Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera. 225-245. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Politik Etis yang mendapat dukungan dari kalangan kapitalis dan industrialis mengalami banyak penyimpangan. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Migrasi Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. (Indonesia) Revitalisasi Keindonesiaan[pranala nonaktif permanen] (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarsipkan 2005-05-07 di Wayback Machine., Pikiran Rakyat (Indonesia) Osmose Budaya, Kartini dan Kreativitas Sastra[pranala nonaktif permanen] (Indonesia) Sejarah Umum Politik Etis di Indonesia Diarsipkan 2017-12-16 di Wayback Machine. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program-program Kebijakan tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, akibatnya banyak pejabat kolonial menjadi kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan yang langgeng. hlm. 151. Imigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi. Kritik Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Edukasi Potret kelompok anak-anak pribumi yang menghadiri sekolah Koning Willem III, Weltevreden, Batavia, 1919-1920. hlm. 18. Kebijakan tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Brooshooft bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan berargument bahwa Belanda berhutang kepada rakyat Hindia Belanda sebuah 'hutang kehormatan'[3] Pada tahun 1901, Ratu, di bawah nasihat dari perdana menterinya dari Partai Kristen Anti-Revoluti, secara resmi mendeklarasikan "Kebijakan Etis" yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Irigasi (pengairan), yaitu pembangunan dan prasarana pengairan. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah wingewest (wilayah yang menghasilkan keuntungan). Akibatnya, banyak kalangan kolonial yang memandang Kebijakan tersebut sebagai kesalahan yang bertentangan dengan kepentingan Belanda.[1] Penyimpangan Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern; sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban, yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Kedua, program pendidikan dari Kebijakan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Kebangkitan Nasional Indonesia, memberikan alat intelektual kepada orang Indonesia untuk mengutar dan mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri di sepanjang garis Barat. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Edukasi lebih banyak ditujukan untuk mendapatkan tenaga terampil yang murah. Ketegangan finansial dari Depresi Hebat mengakhiri Kebijakan secara definitif. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Tujuan Para pendukung Kebijakan yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Politik etis terkemuka Willem Anthony Engelbrecht Lihat juga Portal Indonesia Sistem Tanam Paksa Hindia Belanda Imperium Belanda Sejarah Indonesia Revolusi Nasional Indonesia Rujukan ^ a b Cribb, Robert (1993). London: Macmillan. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. ISBN 0-521-54262-6. Pranala luar (Inggris) Article: Ethical Policy (Indonesia) Semangat Kartini dan Politik Etis Diarsipkan 2005-05-07 di Wayback Machine. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi: Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Mereka dijadikan kuli kontrak. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Lihat pula: Sistem Tanam Paksa Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Conrad Theodor van Deventer menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa Pemerintah Kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi. Cambridge University Press. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Kebijakan tersebut kandas pada dua masalah. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). ISBN 0-333-57690-X. ^ a b Vickers, Adrian (2005). Dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai "kekanak-kanakan" dan

membutuhkan bantuan, bukan didasarkan. Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi. Pengaruh politik etis dalam bidang pendidikan dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda.
Jurnalis Pieter Brooshoof (1845-1921),[3] menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut. Brooshoof mengirim reporter ke seluruh nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal; mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan dan epidemi pada tahun 1900. Dengan demikian, pelaksanaan Politik Etis merupakan politik untuk membuat Indonesia membalas budi kepada Belanda dengan cara meningkatkan pembangunan di segala bidang. hlm. 17. Perumusan Siswa di Sekolah Pertanian untuk Indonesia di Jawa. Pada tanggal 17 September 1901, dalam pidatonya dari tahta di hadapan Dewan Negara Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan secara resmi mengartikulasikan kebijakan baru - bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral kepada penduduk asli Hindia Belanda yang dapat diringkas dalam 'Tiga Kebijakan' Irigasi, Transmigrasi, dan Edukasi. Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang bumiputera. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap bumiputera yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. ^ Ricklefs, M.C. (1991). Hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Irigasi lebih banyak dibangun untuk mengairi perkebunan swasta Belanda. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Migrasi lebih ditujukan ke daerah-daerah yang menjadi pengembangan perkebunan-perkebunan swasta seperti ke wilayah Deli, Sumatera Timur. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20, yang merupakan dasar implementasi Kebijakan.[4] Para pendukung Kebijakan berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda sementara kondisi masyarakat pribumi nusantara buruk. Migrasi Kebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatra dan Kalimantan, dimulai dengan skema yang disponsori pemerintah sejak tahun 1905 dan seterusnya. Komponen pendidikan dari Kebijakan ini terutama bersifat teknis karena tidak bertujuan untuk menciptakan pria dan wanita Belanda berkulit coklat.

## Referensi

## Daftar pustaka

## Referensi tambahan

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi

## Referensi